

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Pesisir Pandansari

1. Profil kecamatan Sanden

Kecamatan Sanden merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan ini berada pada bagian selatan Kabupaten Bantul, disebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kretek, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Srandakan dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pandak. Kecamatan ini terdiri dari 4 desa yaitu Gadingsari, Murtigading, Gadingharjo dan Srigading. Kondisi alamnya berupa dataran rendah dengan tinggi permukaan laut 4-20 meter.

Luas wilayah kecamatan Sanden yaitu 23,16 km². Sebagian besar beragama islam yaitu sebesar 99,1% penduduk beragama Islam.

Tabel 4. 1
Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Sanden, Bantul

No	Desa/Kelurahan	Penduduk
1.	Gadingsari	10.182
2.	Gadingharjo	3.912
3.	Sri Gading	9.800
4.	Murtigading	8.830
5.	Jumlah	32.724

Sumber: Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri, Diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Pada tabel diatas menjelaskan jumlah penduduk di kecamatan Sanden yang terdiri dari empat wialayah Desa. Wilayah Desa Gadingsari memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 10.182 penduduk, kemudian diikuti oleh Desa Sri Gading dengan jumlah penduduk sebesar 9.800 penduduk, peringkat ketiga ditempati Desa Murtigading dengan 8.830 penduduk dan paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Gadingharjo dengan jumlah 3.912 penduduk.

2. Profil Dusun Wonoroto

Dusun Wonoroto merupakan salah satu dusun di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Dusun Wonoroto berbatasan langsung dengan dusun-dusun lain di sekitarnya, yaitu sebelah utara dengan Dusun Bongos dan Dusun Wonorejo , sebelah selatan Samudera Hindia, sebelah barat Dusun Wonorejo dan Dusun Poncosari dan sebelah timur dengan Dusun Wonoroto.

Mayoritas penduduk Dusun Wonoroto berprofesi sebagai wirausaha dan petani. Hasil bumi unggulan dari Dusun Wonoroto adalah padi dan ketela. Jumlah penduduk Dusun Wonoroto adalah 560 ± penduduk yang terdiri dari 170 kepala keluarga. Dusun Wonoroto merupakan salah satu dusun di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden,

Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:



Sumber : Website Desa Gadingsari 2017

Gambar 4. 1
Peta Dusun Wonoroto

- Sebelah Utara : Dusun Bongos dan Dusun Wonorejo
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Barat : Dusun Poncosari
Sebelah Timur : Dusun Klatak

3. Aksesibilitas

Dusun Wonoroto berjarak \pm 30 km dari Kota Yogyakarta. Jalan menuju dusun ini sudah teraspal dengan baik sehingga aksesnya mudah. Tempat ini dapat dituju melalui Jalan Bantul. Terdapat transportasi umum hanya saja tidak sampai wilayah

dusun, transportasi umum hanya melewati Jalan Samas saja, sehingga dari Jalan Samas menuju ke wilayah dusun hanya bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan kondisi jalan di wilayah Dusun Wonoroto berupa jalan aspal untuk jalan utama, cor dan setapak untuk jalan kecil.

4. Kondisi Alam dan Potensi Fisik

Dusun Wonoroto merupakan salah satu dusun yang terletak di daerah pantai di selatan Yogyakarta. Walaupun jumlah penduduknya cukup banyak, namun dusun ini tidak terlalu padat penduduk. Hal ini disebabkan karena dusun ini memiliki wilayah yang cukup luas. Berikut disajikan dalam tabel :

Tabel 4. 2
Luas Tanah Dusun Wonoroto

Luas Tanah	Keterangan
36 hektar	Pesisir Pantai
29 hektar	Sawah
5 hektar	Tegalan

Sumber : Data primer (dioalah)

Sebagian besar wilayah dusun Wonoroto adalah tanah *SG* (*Sultan's Ground*) seluas 40 hektar. Ditinjau dari potensinya alamnya, 36 hektar wilayah Wonoroto adalah pekarangan (pesisir pantai), 29 hektar berwujud sawah dan 5 hektar tanah berupa tegalan.

Potensi diwilayah pesisir memiliki keunggulan yang luar bisa dalam pengembangan optimalisasi Pantai Pandansari berikut ini merupakan potensi yang dimiliki Pantai Pandansari :

Tabel 4. 3
Potensi Ekowisata Pantai Pandansari

No	Potensi Wisata
1	Terdapat Kebun Buah Naga
2	Terdapat Pohon Cemara Rindang
3	Terdapat Spot Pantai
4	Terdapat Menara Mercusuar
5	Terdapat Tambak Udang
6	Terdapat Embung

Sumber : Data primer (dioalah)

Keunggulan potensi ekowisata diatas sangatlah menunjang wisata jika dikelola secara maksimal. Dalam memenuhi prosedur ekowisata dari tingkat wisata yang ditawarkan sangatlah memenuhi dan berpotensi. Pengetahuan lingkungan dan pendidikan akan didapatkan dari kunjungan wisata tersebut, sayangnya masih belum terdapat paket wisata yang menawarkan. Infrastruktur yang masih minim juga membuat pengunjung masih enggan untuk berwisata ke Pantai Pandansari. Sementara ini Pantai Pandansari ramai dikunjungi hanya pada waktu libur panjang saja, itu pun masih minim jika dibandingkan dengan pantai-pantai diwilayah Pantai Bantul lainnya, seperti Goa Cemara yang kini mulai menunjukkan eksistensinya, yang

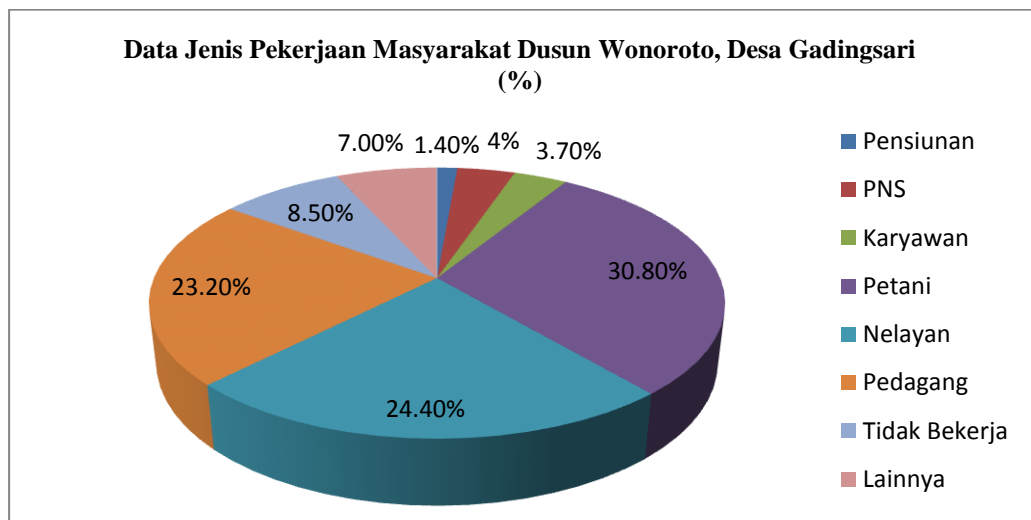
notabene Pantai Goa Cemara masih dibilang muda dibandingkan Pantai Pandansari yang lebih dahulu dibuka.

Diharapkan dengan potensi yang dimiliki mampu dikolaborasikan dengan sistem manajemen yang profesional dan pemerintah juga ikut mendukung baik dari segi materi ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat sekitar mampu merasakan manfaat positif dari adanya Pantai Pandansari ini.

5. Kondisi Pekerjaan

Jumlah penduduk di dusun Wonoroto 506 orang sebagian besar bermata pencarian disektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Berikut data Jenis pekerjaan dusun Wonoroto :



Sumber : Wawancara Biro kependudukan Balai Desa Gadingsari (diolah)

Gambar 4. 2
Jenis Pekerjaan Masyarakat Dusun Wonoroto

Dari data diatas bisa dilihat bahwa pekerjaan masyarakat Dusun Wonoroto, Desa Gadingsar tertinggi yaitu sebagai Petani sebesar 30,80% kemudian nelayan pada posisi kedua dengan presentase sebesar 24,40% disusul ditempat ketiga yaitu pedagang sebesar 23,20 %, 4% sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), 3,70 % sebagai karyawan, 1,40 % pensiunan dan 8,50 % bekerja disektor lainnya. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun Wonoroto, Desa Gadingsari mayoritas bekerja disektor pertanian,nelayan/perikanan, dan perdagangan. Dalam kriteria Batasan Ekowisata yang dijabarkan oleh *Linberg* dan *Harkins* (1993) dalam karyanya *The Ecotourism Society*, menyebutkan bahwa *Ecotourism* dalam pembentukan dan pengelolaannya harus melibatkan masyarakat setempat yang memiliki keahlian dalam menunjang peningkatan wisatanya. Dalam kasus ini berarti Pantai Pandansari sudah berpotensi karena masyarakatnya mayoritas bekerja disektor yang menunjang pengembangan pantai yaitu petani, nelayan dan pedagang dan banyak juga warga yang menggantungkan hidup di sektor wisata yaitu di Pantai Pandansari.

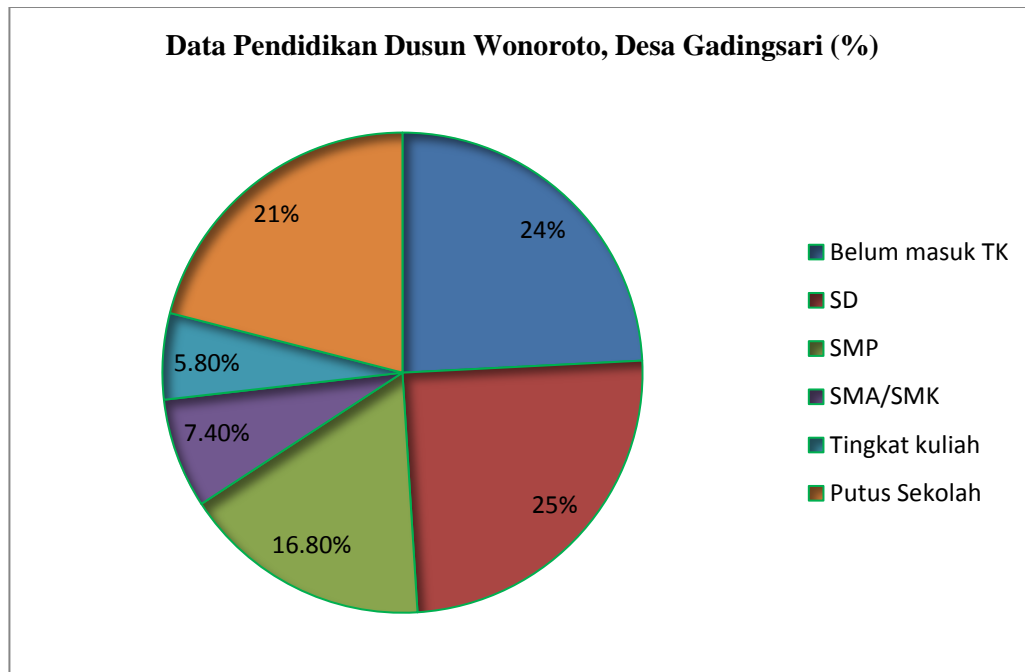
6. Kondisi Sosial dan Masyarakat

1. Agama

Sebagian besar penduduk Dusun Wonoroto beragama Islam.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Dusun Wonoroto, Desa Gadingsari masih rendah, hal ini bisa dilihat melalui data tingkat jenjang pendidikan berikut :



Sumber : Wawancara Biro kependudukan Balai Desa Gadingsari (diolah)

Gambar 4. 3
Data Tingkat Pendidikan Dusun Wonoroto

Data diatas menunjukkan masih rendahnya pendidikan di Dusun Wonoroto, Desa Gadingsari dimana lulusan Sekolah Dasar (SD) masih tertinggi dengan 25%, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah persentasenya terlihat dari penyempitan pendidikan tingkat SMP sebesar 16,80 % kemudian SMA/SMK sebesar 7,40% dan tingkat perkuliahan sebesar 5,80 %, yang memilik adalah angka putus sekolah mencapai 21% sehingga memilih untuk ikut

bekerja dengan orangtuanya atau keluar daerah. Hal ini menjadi pengaruh dalam bentuk manajemen pengelolaan pantai secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di daerah dusun Wonoroto yang menjadi tempat pantai Pandansari.

B. Gambaran Umum Responden

Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui penyebaran kuisisioner di berbagai kalangan masyarakat. Kuisisioner sebelumnya sudah dibuat melalui *pra* survey dan konsultasi dengan pihak terkait Dosen Pembimbing. Dalam prosesnya penulis menyebarkan 15 kuisisioner, namun data yang mampu diolah ada 12 kuisisioner karena 3 data sebelumnya mengalami ketidaklengkapan dalam jawaban. Berikut data dalam penyebaran kuisisioner :

Tabel 4. 4
Data Kuisisioner Penelitian

Data Klasifikasi	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebarkan	15	100%
Kuisisioner yang kembali	15	100%
Kuisisioner yang tidak bisa diolah	3	20%
Kuisisioner yang bisa digunakan untuk diolah	12	80%

Sumber : Data primer (diolah)

Kalangan masyarakat yang dipilih untuk mengisi kuisisioner terdiri kriteria yaitu Pemerintah meliputi Pemerintah Desa Gadingsari dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pengelola Pantai Pandansari, masyarakat dusun Wonoroto dan kalangan akademisi. Kriteria tersebut merupakan bagian dari

berbagai pandangan masyarakat sehingga tidak hanya satu perspektif masyarakat yang menilai mengenai optimalisasi Pantai Pandansari.

Tabel 4.5
Frekuensi Target Responden

No	Sasaran Responden	Frekuensi	Presentase
1	Pemerintah Desa Gadingsari	2	16,7%
2	Dosen	1	8,3%
3	Pengelola Pantai	2	16,7%
4	Dinas Pariwisata Kab. Bantul	2	16,7%
5	Masyarakat	5	41,6%
Total		12	100%

Sumber : Data Primer (diolah)

Pada tabel diatas menunjukkan frekuensi dari target responden yang dimintai data kuisisioner. Pemerintah Desa Gadingsari berjumlah 2 orang, kemudian Dosen berjumlah 1 orang disusul oleh pengelola pantai 2 orang, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berjumlah 2 orang dan yang terakhir masyarakat berjumlah 5 orang.

1. Analisis Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin Responden

Pada penelitian ini karakteristik responden yang diamati meliputi jenis kelamin dan juga usia responden. Berikut merupakan hasil dari distribusi frekuensi responden :

Tabel 4. 6
Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	10	83,3%
Perempuan	2	16,7%
Total	12	100%

Sumber : Data Primer (diolah)

Tabel diatas tadi menunjukkan responden berdasarkan jenis kelamin yang meliputi 10 responden terdiri dari laki-laki atau 83,3 persen dan 2 responden terdiri dari perempuan dengan presentase sebesar 16,7 persen.

b. Usia Responden

Pada saat observasi dan pengisian kuisioner dilakukan oleh berbagai macam lapisan masyarakat yang tentunya dalam proses pengisian kuisioner ini terdiri terdiri dari berbagai jenis usia. Berikut ini penulis sajikan data usia reponden dalam sebuah tabel :

Tabel 4. 7
Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	<30	2	16,7%
2	31-40	3	25%
3	40>	7	58,3%
Total		12	100%

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan penjelasan tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa responden yang berusia <30 tahun sebanyak 2 orang kemudian responden yang berusia antara 31-40 sebanyak 3 orang dan responden

yang memiliki usia 40> sekitar 7 orang. Usia diatas 40 tahun mendominasi dalam pengisian kuisisioner tersebut.

D. Analisis Data

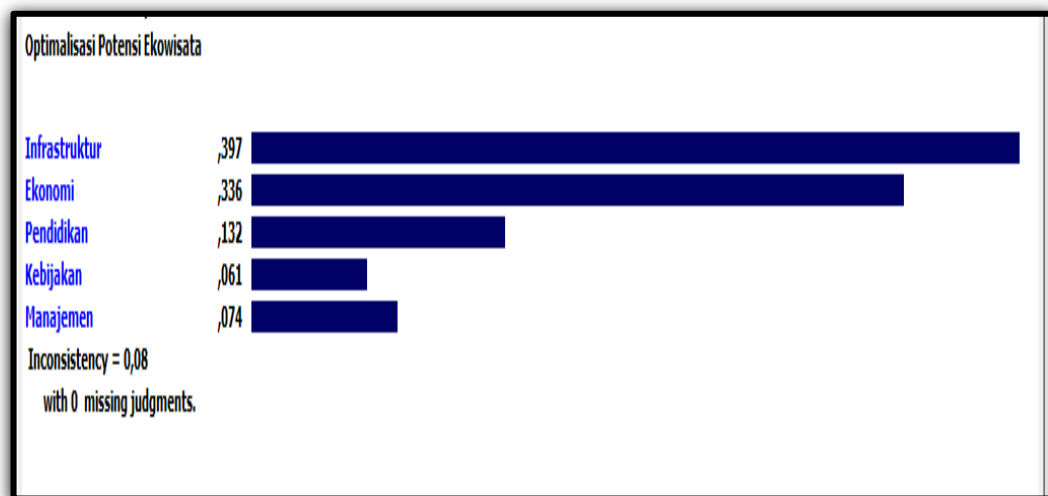
1. Analytical Hierarchy Process

Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Metode AHP adalah metode yang ditemukan dan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970, yang membantu manusia dalam menentukan pengambilan keputusan yang disusun atas logika, pengetahuan dan pengalaman. Dalam penerapannya disusun secara terencana dan sistematis sesuai pertimbangan. Kemudian metode ini juga membantu memecahkan masalah kompleks melalui penentuan kriteria-kriteria yang disusun pada hirarki kemudian memberikan nilai bobot angka sebagai substitusi dari pandangan atau persepsi manusia. Dengan diberikan suatu sintesis maka akan diketahui skala prioritas.

Pada penelitian ini dalam menentukan prioritas atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi ekowisata di Pantai Pandansari memerlukan berbagai pendapat dan penilaian dari responden terutama masyarakat atau pengelola pantai, kemudian akademisi dan juga pemerintah. Berbagai kriteria yang sudah ditentukan yang akan diajukan sebagai kuisisioner didapatkan melalui hasil *pra survey* yang tentunya berkompeten dalam wisata dan bimbingan Dosen. Adapun aspek-aspek atau kriteria yang didapatkan bisa dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini :

Analisis Hirarki Proses di penelitian mendapatkan data dari responden yang sudah ditentukan sebelumnya melalui *pra-survey* yaitu meliputi akademisi, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian data yang sudah didapatkan diolah sebelum di input menggunakan alat analisis yaitu *Expert Choice 11*. Analisis tahap pertama yaitu membandingkan skala prioritas dalam kriteria-kriteria untuk mengoptimalkan Pantai Pandansari sebagai tujuan utamanya. Adapun hasil dari pengolahan Analisis Hirarki Proses menggunakan alat analisis *Expert Choice 11* adalah sebagai berikut :

a. **Berdasarkan Prioritas Kriteria**



Sumber : Output AHP Data Primer 2017, diolah

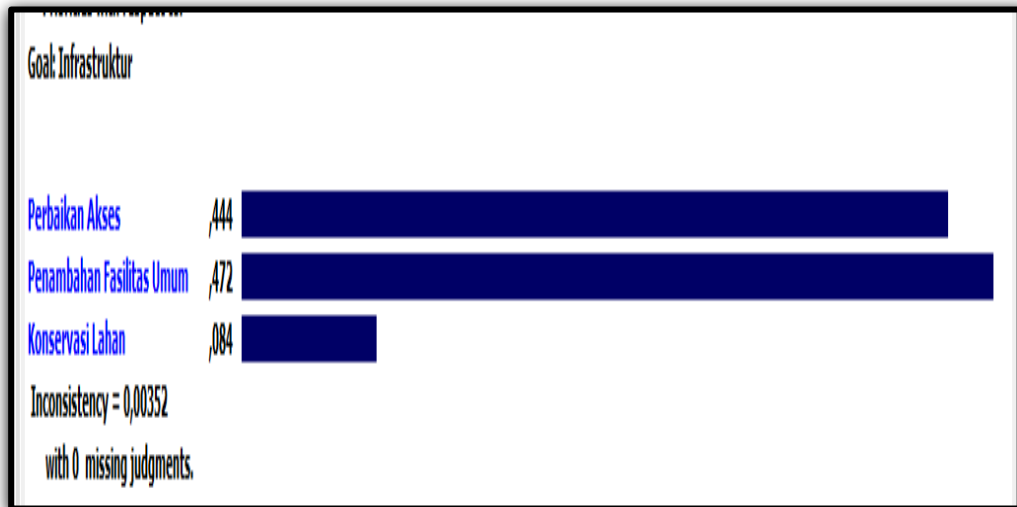
Gambar 4. 4
Prioritas Kriteria untuk Tujuan Utama

Berdasarkan gambar 4.5 diatas menunjukkan hasil pengolahan data kriteria untuk optimalisasi Pantai Pandasari menggunakan alat analisis *Expert Choice* dimana hasil paling tinggi pilihan semua responden adalah infrastruktur dengan nilai 0,397 persen kemudian diposisi kedua dari sisi

ekonomi sebesar 0,336 persen, selanjutnya di peringkat ketiga ada pendidikan dengan presentase sebesar 0,132, diikuti manajemen diposisi keempat dengan nilai 0,074 persen dan paling terakhir atau posisi kelima ditempati oleh kebijakan pemerintah dengan 0,061 persen. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dipilih menjadi prioritas utama oleh responden sebagai kriteria dalam mengoptimalkan potensi Pantai Pandansari. Nilai *inconsistency ratio* pada kriteria diatas tadi sebesar 0,08 persen yang menunjukkan bahwa hasil Analisis Hirarki Proses (AHP) dapat diterima karena nilai *inconsistency ratio* kurang dari 0,10 persen.

b. Berdasarkan Aspek Infrastruktur

Pada tahap kedua ini dilakukan pengolahan data yaitu bagian subkriteria atau pilihan alternatif-alternatif yang sudah ditentukan sebelumnya melalui *pra survey*. Alternatif pertama dari aspek Infrastruktur yang meliputi perbaikan akses, penambahan fasilitas umum dan konsevasi lahan. Gambar dibawah ini merupakan hasil pengolahan data dari aspek infrastruktur :



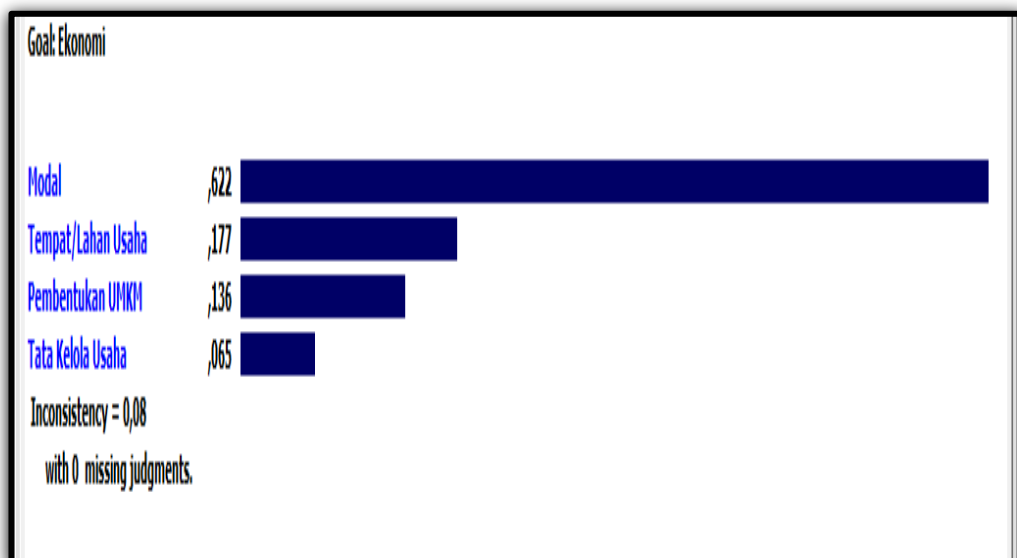
Sumber : Output AHP Data Primer 2017, diolah

Gambar 4. 5
Prioritas Alternatif untuk Kriteria Infrastruktur

Pada gambar 4.6 diatas tadi menunjukkan hasil dari prioritas alternatif untuk kriteria infrastruktur, hasilnya adalah peringkat pertama responden lebih banyak memilih dan memprioritaskan penambahan fasilitas umum dengan nilai 0,472 persen, kemudian perbaikan akses berada diposisi kedua dengan besaran prsesntase yaitu sebesar 0,444 persen dan peringkat ketiga atau paling terakhir responden memilih konservasi lahan dengan nilai 0,084 persen. Hasil keseluruhan menyimpulkan prioritas alternatif yaitu penambahan fasilitas umum dipilih mayoritas responden dalam kriteria infrastruktur. *Inconsistency ratio* pada alternatif Infratraktur sebesar 0,003 persen yang artinya dapat diterima hasilnya

c. Berdasarkan Aspek Ekonomi

Tahap ketiga adalah mengolah data dari kriteria kedua yaitu aspek ekonomi. Adapun alternatif dalam kriteria ekonomi adalah modal, tempat/lahan usaha, pembentukan UMKM dan tata kelola usaha. Ketiga kriteria alternatif pada ekonomi tadi dirasa sudah mewakili semua yang berhubungan dengan keluhan sebagian masyarakat Wonoroto yang setiap harinya beraktivitas di daerah Pantai Pandansari. Hasilnya nanti akan diketahui dan disajikan oleh penulis dalam bentuk tabel hasil pengolahan AHP. Pada gambar dibawah ini penulis sajikan hasil pengolahan data aspek ekonomi :



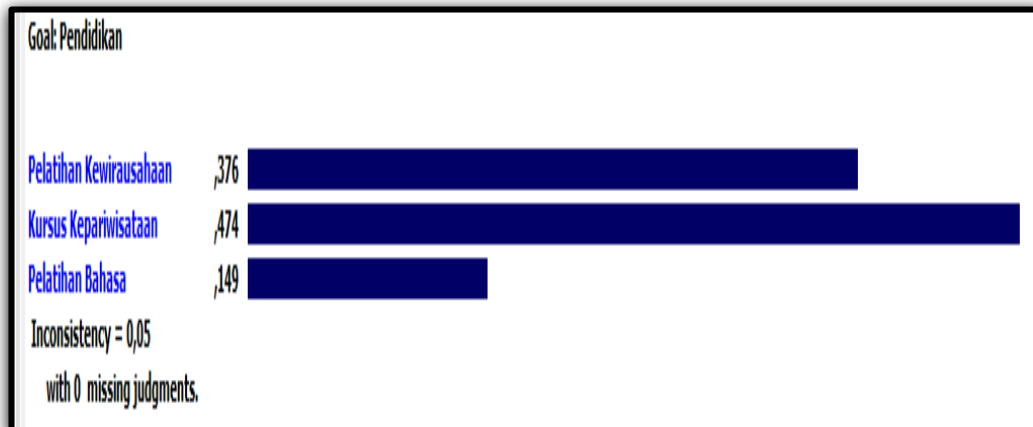
Sumber : Output AHP Data Primer 2017, diolah

Gambar 4. 6
Prioritas Alternatif untuk Kriteria Ekonomi

Pada gambar 4.7 menunjukkan hasil pengolahan data prioritas alternatif untuk kriteria ekonomi yang sudah dipilih oleh responden. Posisi pertama mayoritas responden memilih prioritas modal dengan nilai sebesar 0,622 persen, kemudian diperingkat kedua responden memilih tempat/lahan usaha dengan nilai presentase sebesar 0,177 persen, selanjutnya diposisi ketiga ditempati oleh pembentukan UMKM yang dipilih oleh responden dengan nilai sebesar 0,136 persen dan yang paling terakhir diposisi keempat ditempati oleh tata kelola usaha dengan presentasi nilai sebesar 0,065 persen. *Inconsistency ratio* pada pengolah data yang ketiga ini sebesar 0,08 atau masih dibawah 0,10 persen yang artinya dapat diterima.

d. Berdasarkan Aspek Pendidikan

Tahap berikutnya adalah mengolah data untuk prioritas alternatif untuk kriteria pendidikan. Kriteria pendidikan memiliki prioritas alternatif meliputi pelatihan kewirausahaan, kursus kepariwisataan dan pelatihan bahasa. Berikut dibawah ini gambar hasil dari pengolahan data prioritas alternatif untuk kriteria pendidikan :



Sumber : Output AHP Data Primer 2017, diolah

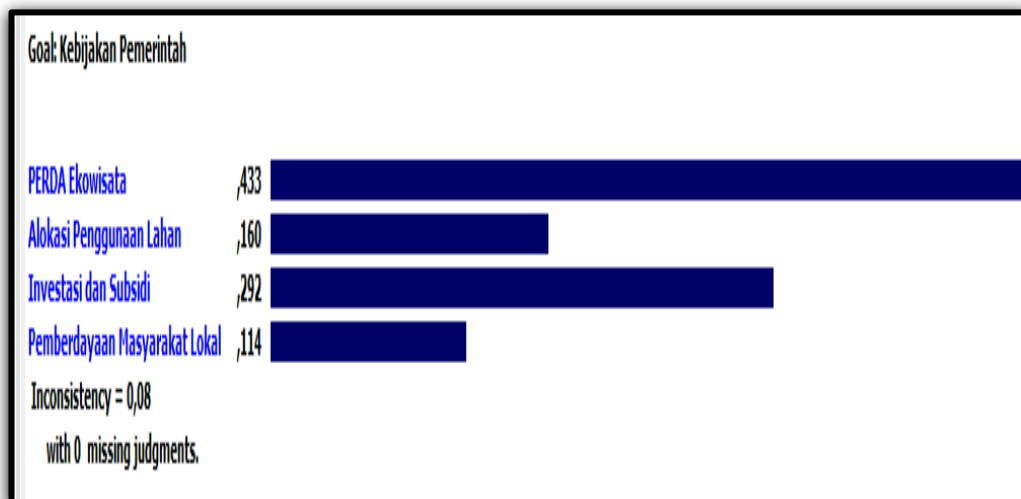
Gambar 4. 7
Prioritas Alternatif untuk Kriteria Pendidikan

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan hasil pengolahan metode Analisis Hirarki Proses dengan alat analisis *expert choice* mengenai data prioritas alternatif untuk kriteria pendidikan. Hasilnya adalah responden sebagian besar memilih kursus kepariwisataan diurutan pertama dengan nilai presentasi sebesar 0,474 persen, kemudian diurutan kedua responden memilih pelatihan kewirausahaan dengan besaran persentasenya yaitu 0,376 persen dan diurutan terakhir yaitu pelatihan bahasa dengan persentase sebesar 0,149 persen. Hasil dari *inconsistency ratio* yaitu sebesar 0,05 persen atau masih dibawah 0,10 persen yang menandakan bahwa hasil dapat diterima.

e. Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah

Tahap berikutnya yang ke lima data yang diolah adalah data tentang prioritas alternatif untuk kriteria kebijakan pemerintah yang didalamnya meliputi peraturan daerah ekowisata, alokasi penggunaan

lahan, investasi dan subsidi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Gambar dibawah ini disajikan hasil pengolahan data prioritas alternatif dengan kriteria kebijakan pemerintah :



Sumber : Output AHP Data Primer 2017, diolah

Gambar 4. 8
Prioritas Alternatif untuk Kriteria Kebijakan Pemerintah

Pada gambar 4.9 menunjukkan hasil pengolahan data prioritas alternatif untuk kriteria kebijakan pemerintah. Hasilnya menunjukkan peraturan daerah ekowisata menempati prioritas utama dengan presentase sebesar 0,433 persen, kemudian di posisi kedua ditempati oleh investasi dan subsidi dengan presentase 0,292 persen, selanjutnya posisi ketiga alokasi penggunaan lahan sebesar 0,150 persen dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat lokal dengan presentase sebesar 0,114 persen. *Incosistency ratio* menunjukkan hasil 0,08 persen atau masih dibawah 0,10 persen yang diartikan hasil dapat diterima. Hasil kesimpulan untuk

prioritas alternatif kriteria kebijakan pemerintah mayoritas responden memilih pembuatan peraturan daerah ekowisata.

f. Berdasarkan Aspek Manajemen

Tahap yang terakhir dalam pengolahan data prioritas alternatif yaitu kriteria manajemen. Dalam kriteria manajemen ini prioritas alternatifnya meliputi promosi, penguatan struktur pengelola dan pembentukan koperasi. Adapun hasil dari pengolahan data aspek manajemen adalah sebagai berikut :



Sumber : Output AHP Data Primer 2017, diolah

Gambar 4. 9
Prioritas Alternatif untuk Kriteria Manajemen

Pada gambar 4.10 menunjukkan hasil dari pengolahan data prioritas alternatif untuk kriteria kebijakan pemerintah. Hasilnya menunjukkan penguatan struktur pengelola menempati prioritas utama dengan presentase sebesar 0,443 persen, kemudian di posisi kedua ditempati oleh promosi dengan presentase 0,387 persen, dan selanjutnya posisi ketiga pembentukan koperasi sebesar 0,169 *Inconsistency ratio* menunjukkan hasil

0,02 persen atau masih dibawah 0,10 persen yang diartikan hasil dapat diterima. Hasil kesimpulan untuk prioritas alternatif kriteria manajemen adalah penguatan struktural menjadi pilihan mayoritas responden.

2. Pembahasan

Pendekatan yang kedua dalam penelitian yang berjudul Optimalisasi Pantai Pandansari untuk pemberdayaan masyarakat pesisir menggunakan pendekatan *grounded theory*. *Grounded theory* pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1967. Mereka berdua membuat sebuah buku yang berjudul *The Discovery of theory strategies for Qualitative Research* yang memuat mengenai detail dari *grounded theory*. Glaser dan Staruss memaparkan teori tersebut dan menjelaskan sesuai dengan keadaan situasi empiris yang terjadi dimasyarakat, akan tetapi teori dan penjabaran tersebut berangkat dari sebuah data terlebih dahulu yang nantinya sebagai acuan dalam pembuatan teori baru ataupun memperluas dan memperkuat teori yang sudah ada. *Grounded Theory* termasuk dalam metode penelitian kualitatif dan bukan dimulai teori untuk menguji sebuah teori karena bisa saja fenomena dimasyarakat berbeda dengan teori yang sudah ada. Dalam penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam hasil dari metode kuantitatif AHP yang sudah dianalisis.

1. Penyusunan Konsep

Dibawah ini merupakan hasil keseluruhan dari Kriteria pertanyaan yang diajukan kepada responden beserta jawaban responden yang menjawab terutama responden dari masyarakat dan pengelola Pantai Pandansari.

Pertanyaan terdiri dari 5 kriteria yang meliputi setiap kriteria yaitu infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kebijakan pemerintah dan manajemen. Tidak semua jawaban responden dicantumkan akan tetapi hanya bagian jawaban terpenting yang mendukung penelitian. Berikut ini jawaban responden berdasarkan kriteria :

a. Kriteria 1 : Infrastruktur

Infrastruktur menjadi bagian terpenting dalam pembangunan kawasan ekowisata dalam menunjang kebutuhan wisatawan. Dalam penelitian ini Pantai Pandansari berdasarkan *pra survey* masih minim dalam infrastruktur berikut tanggapan dan jawaban dari dua responden (P) yang meliputi masyarakat setempat (P1) dan pengelola pantai (P2), berikut ini jawaban sekilasnya :

“Infrastruktur di Pandansari masih dikit mas, makannya pengunjung sepi. Disini gak ada mushola, kamar mandi, parkirnya sempit dan masih belum tertata. Padahal dipantai tetangga infrastrukturnya sudah berkembang kita gini-gini aja, makannya yang kerja di pantai cuma penambak udang sama buah naga. Kalau warung-warung biasanya pas hari liburan aja (P1)”

“Kalau disuruh milih ekonomi apa infrastruktur saya milih infrastruktur mas, soalnya nanti kalau fasilitas pantai lengkap dan nyaman pengunjung makin rame dan kegiatan ekonomi jadi hidup. Kami dari POKDARWIS sudah sering mengajukan

proposal ke Dinas Pariwisata Kabupaten tapi jarnag ditanggapi, mungkin karena proposalnya ketumpuk-tumpuk jadi gak dibaca. Padahal pantai Pandansari sudah diresmikan 8 tahun tapi gini-gini aja. La wong ini aja kami buat parkir an urunan dari dana pribadi masyarakat, yang kerja ya kita-kita juga.(P2)”

b. Kriteria 2 : Ekonomi

Dalam mata pencaharian warga dusun Wonoroto masih mayoritas berdagang dan bertani. Seberapa penting keberadaan Pantai Pandansari dalam menunjang perekonomian atau hanya sebagian kecil yang mampu memanfaatkan keberadaan potensi ekowisata Pantai Pandansari, berikut tanggapan dari responden pertama yaitu pedagang di Pantai Pandansari (P2) dan petani buah naga (P2) :

“Pemerintah gak ada bantuan buat kami, modal dapat sendiri barengan sama suami. Ibu mah lebih baik modal sendiri daripada pinjem sana-sani jadi pikiran, ya kecil-kecilan lah warungnya. Kalau lagi sepi bersih paling untung lima puluh ribu kalau lagi hari libur ya sampe dua atus ribu, bersyukur aja. Kalau bapak jadi petani disawah belakang sana, ya lumayan buat nambah-nambah”

“Udah lama mas saya punya kebun buah naga ini, semenjak pantai ini dibuka buat umum. Semua modal pribadi, dari pupuk sampai bibit gak ada bantuan dari pemerintah sama sekali kecuali tanahnya karena milik Sultan. Biasanya bulan-

bulan ini mulai panen sampai maret, sebagian dijual kepasar sebagian lagi dijual langsung ditempatnya. Ya alhamdulillah bisa buat ngidupin keluarga anak sama istri (P2)”

c. Kriteria 3 : Pendidikan

Sumber daya manusia juga memiliki peran penting dalam membangun ekowisata, oleh karenanya SDM juga harus berkualitas dan mencukupi. Berikut ini jawaban dari responden mengenai sumber daya manusia kepada masyarakat setempat (P) :

“Disini ada sekitar 170 KK mas, tapi pemuda disini kebanyakan kalau sudah lulus SMA atau SMK langsung kerja, ada yang bantuin orangtuanya atau kerja keluar kota. Sebenarnya anak sini yang kuliah juga ada, bahkan beasiswa tapi kalau gak dapat beasiswa mereka gak ngelanjutin pendidikannya.”

d. Kriteria 4 : Kebijakan Pemerintah

Sebagai pelayan masyarakat pemerintah juga memiliki andil besar dalam pengembangan Pantai Pandansari. Kemampuan membuat kebijakan dan hak kekuasaan yang tinggi akan lebih mempercepat terciptanya daerah ekowisata Pantai Pandansari. Tapi apakah masyarakat merasakan dampak dari kebijakan pemerintah, apakah

sudah membantu atau malah sebaliknya. Berikut ini jawaban responden dari masyarakat (P1) dan pengelola pantai (P2) :

“Sejauh ini belum ada bantuan yang nyata buat pembangunan pantai Pandansari mas. Hanya mengenai ijin menggunakan lahan, karena memang tanah disekitar pantai itu Sultan Ground, untuk modal atau yang lain-lain belum ada (P1)”

“Dalam sejarahnya pantai Pandansari paling pertama mas dapat SK dari Bupati, sekitar delapan tahun yang lalu, sampai sekarang plangnya masih ada. Tapi sampai saat ini cuma perizinan pemakaian lahan dan ini yang terbaru pembuatan lahan parkir, itupun kecil. Saya sudah mengajukan proposal buat minta fasilitas gak papa kami yang kerjain, tapi sampai sekarang belum ada balesan. Pernah dipanggil dinas pariwisata buat ngajuin apa yang dibutuhin, tapi ya gini-gini aja. Mau gak mau kita pakai dana dan tenaga pribadi juga (P2)”

e. Kriteria 5 : Manajemen

Dala mengatur kegiatan pantai dan evaluasi untuk pembenahan kearah yang lebih baik, aspek manajemen harus diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada, karena pengelola harus dari masyarakat setempat dan dibantu oleh pemerintah. Berikut jawaban dari ketua pengelola pantai Pandansari (P) :

“Kalau POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) pantai sudah ada sejak tahun dua ribu tiga belas mas, anggotanya ada tiga puluh orang. Ada yang yang dari dusun Wonoroto ada juga yang dari luar. Tapi partisipasi masih kurang, jabatan yang harusnya ganti dua tahun sekali masih saya terus yang pegang, karena banyak yang gak mau. Sempet waktu itu beberapa warga datang ke rumah saya buat ngasih hadiah, makanan dan lain-lain biar saya mau jadi ketua POKDARWIS lagi. Ya semoga aja kedepannya ada yang mau menggantikan (P1)”

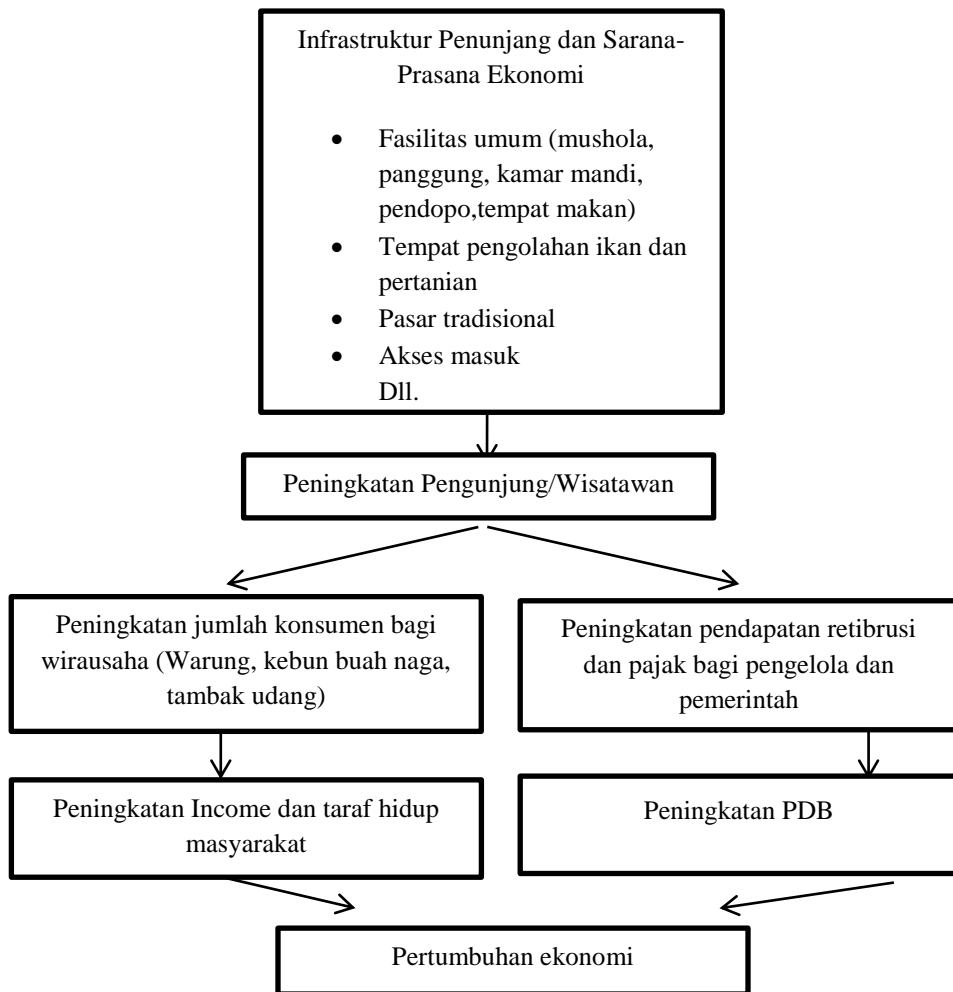
2. Pembahasan Penelitian dan Teori

a. Kriteria Infrastruktur

Setelah mendengar jawaban dari responden dan hasil metode AHP, aspek infrastruktur menjadi prioritas utama dalam optimalisasi Pantai Pandansari. Hal itu karena secara kurun waktu Pantai Pandansari paling awal berdiri dibanding pantai disampingnya, akan tetapi jumlah kunjungan paling rendah. Melalui hasil wawancara dengan pengelola Pantai Goa Cemara mereka mengaku perkembangan infrastruktur sangat pesat dibantu oleh pemerintah dan swasta, sehingga pengunjung ramai walaupun bukan hari libur dan memberikan *income* bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur pantai mampu menyuguhkan hiburan baru seperti pentas seni, *out bond*, panggung mini dll. Hal itu yang menjadi ironi bagi Pantai Pandansari yang notabene lebih potensi dalam ekowisata. Tak heran

jika membandingkan dengan pantai disampingnya yang lebih cepat berkembang, infrastruktur sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan dan optimalisasi Pantai Pandansari.

Sejalan dengan itu, teori ekonomi pembangunan mengenai pengentasan kemiskinan akibat kesenjangan dapat diatasi dengan *trickle down effect* yang artinya kegiatan ekonomi dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan hasilnya mampu menetes kebawah atau dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Tentunya dengan investasi atau bantuan dari pemerintah. Pelaksanaan teori ini sering digunakan pada jaman orde baru dengan pusat kegiatan ekonomi diwilayah tertentu dan hasilnya mampu dirasakan masyarakat kalangan bawah. Dalam penelitian ini dengan adanya infrstruktur penunjang pantai seperti fasilitas umum dan sarana kegiatan ekonomi mampu memberikan efek kepada masyarakat dusun Wonoroto. Berikut dibawah ini disajikan gambar 4.11 mengenai bagaimana jika infarstruktur dibangun sedemikian rupa dan dampaknya bagi masyarakat :



Gambar 4. 10
Trickle down Effect Infrastruktur Pantai Pandansari

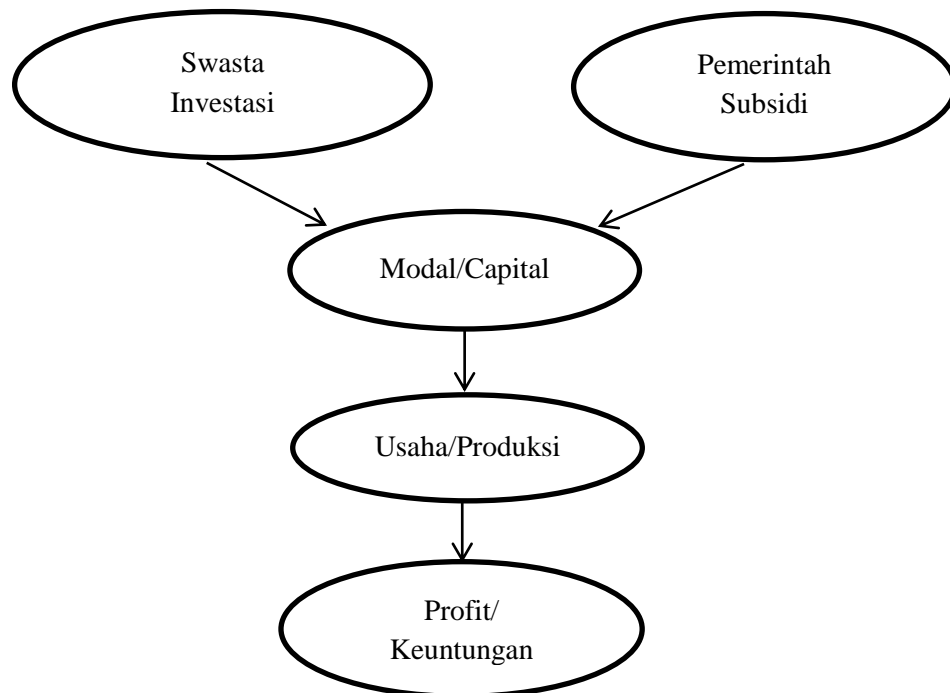
Gambar diatas menunjukkan jika infrstruktur dibangun akan memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat setempat ataupun pemerintah. Setelah mendapat pernyataan dengan akademisi, secara bertahap pengunjung akan mulai ada daya tarik dengan fasilitas yang ditawarkan kemudian akan berdampak pada sektor usaha yang berada disekitar pantai dan *income* akan mengalami kenaikan. Dari segi retribusi juga akan mengalami hal yang sama, dan lebih jauh

sektor pajak akan dirasakan meningkat terhadap pemerintah. Hanya dalam proses dibutuhkan *lag* atau waktu yang cukup lama

b. Kriteria Ekonomi

Dalam hasil penelitian AHP mengenai ekonomi, hasil paling prioritas adalah modal. Dalam menjalankan sebuah usaha untuk mendapatkan pendapatan tentunya harus berawal dari modal. Sayangnya, belum adanya koperasi sebagai penyedia dana membuat masyarakat setempat harus berfikir dua kali untuk mendapatkan modal usaha. Dalam tata kelola dan tempat usaha belum mengalami permasalahan seberat modal usaha, dan memang prioritas utama adalah insentif coba diberikan untuk perkembangan usaha.

Aliran klasik yang diprakarsai oleh Adam Smith mengungkapkan teori penumpukan modal adalah syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. Manusia memiliki kebebasan untuk mengerti kebutuhan hidupnya sendiri dan mengatur pola kebutuhannya. Modal lebih utama dibandingkan pembagian kerja. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis selaras dengan pernyataan Adam Smith. Berikut ini akan dijelaskan secara gambar untuk alur modal dalam pengembangan usaha :



Gambar 4. 11
Arus Modal

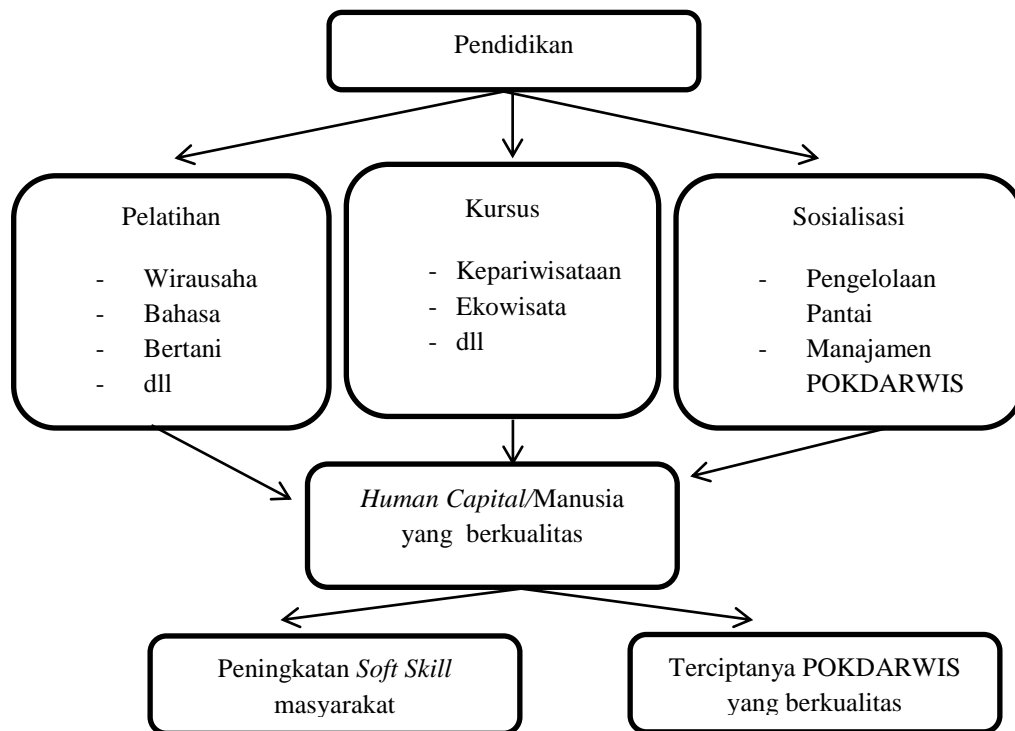
Alur modal diatas menunjukkan bagaimana modal bersumber dari pemerintah yang berupa subsidi ataupun dari pihak swasta berupa investasi. Kemudian modal tersebut digunakan untuk usaha baik secara wirausaha berdagang atau pertanian yang menjual hasil panennya. Kemudian dengan Bergeraknya modal menjadi usaha akan memperoleh profit yang dijadikan sumber pendapatan untuk peningkatan taraf hidup.

c. Kriteria Pendidikan

Sebagai penggerak dan pelaku kegiatan ekonomi dan pengelola pantai, sumber daya manusia harus berkualitas dan memiliki *soft skill* yang mumpuni. Oleh karena itu penting juga untuk memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pada hasil

penelitian AHP dan hasil wawancara, kursus kepariwisataan dirasa sangat dibutuhkan karena mengingat potensi besar yang dimiliki Pantai Pandansari akan tetapi sumber daya manusia belum mampu memanfaatkan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan. Secara partisipasi menurut pengakuan ketua POKDARWIS untuk kesadaran membangun pantai masih rendah, terlihat dari keaktifan masyarakat yang masuk dalam pengelolaan Pantai Pandansari masih minim, hanya sebagian kecil yang masih peduli.

Teori *human capital* berpendapat pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang memberikan banyak manfaat antara lain efisiensi produksi, kondisi kerja yang baik dan peningkatan kesejahteraan. Dalam penelitian ini berbagai macam metode pendidikan bisa digunakan seperti sekolah, kursus, sosialisasi, pelatihan dll. Semua metode pendidikan tadi merupakan saran ahli pariwisata dan tentunya sesuai dengan kebutuhan Pantai Pandansari dalam pengembangan sumber daya manusianya yang memiliki tujuan utama Optimalisasi Pendapatan guna mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut ini kami sajikan skema pendidikan dalam gambar 4.13 :



Gambar 4. 12
Skema Pendidikan untuk Peningkatan SDM

Pada gambar diatas menjelaskan konsep yang diinginkan oleh masyarakat guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang dilakukan untuk jangka menengah bisa melalui kursus, pelatihan dan sosialisasi. Tentunya masyarakat Wonoroto menjadi sasaran utama termasuk POKDARWIS dari Pantai Pandansari. Kolaborasi tentunya dibutuhkan guna membantu perbaikan sumber daya manusia, baik dengan pemerintah atau swasta.

d. Kriteria Kebijakan Pemerintah

Pada hasil penelitian metode AHP, kebijakan pemerintah menempati peringkat terakhir. Hal itu dikarenakan masyarakat di sekitar Pantai Pandansari tidak terlalu berharap dengan kebijakan pemerintah dan cenderung melaksanakan secara mandiri dalam pengelolaan Pantai. Bukan berarti tanpa usaha, POKDARWIS sudah pernah mengirimkan proposal pengajuan dana infrastruktur ataupun segala fasilitas pantai lainnya namun masih diabaikan. Alhasil, swadaya menjadi solusi bagi pengelola Pantai untuk membantu pengembangan pantai.

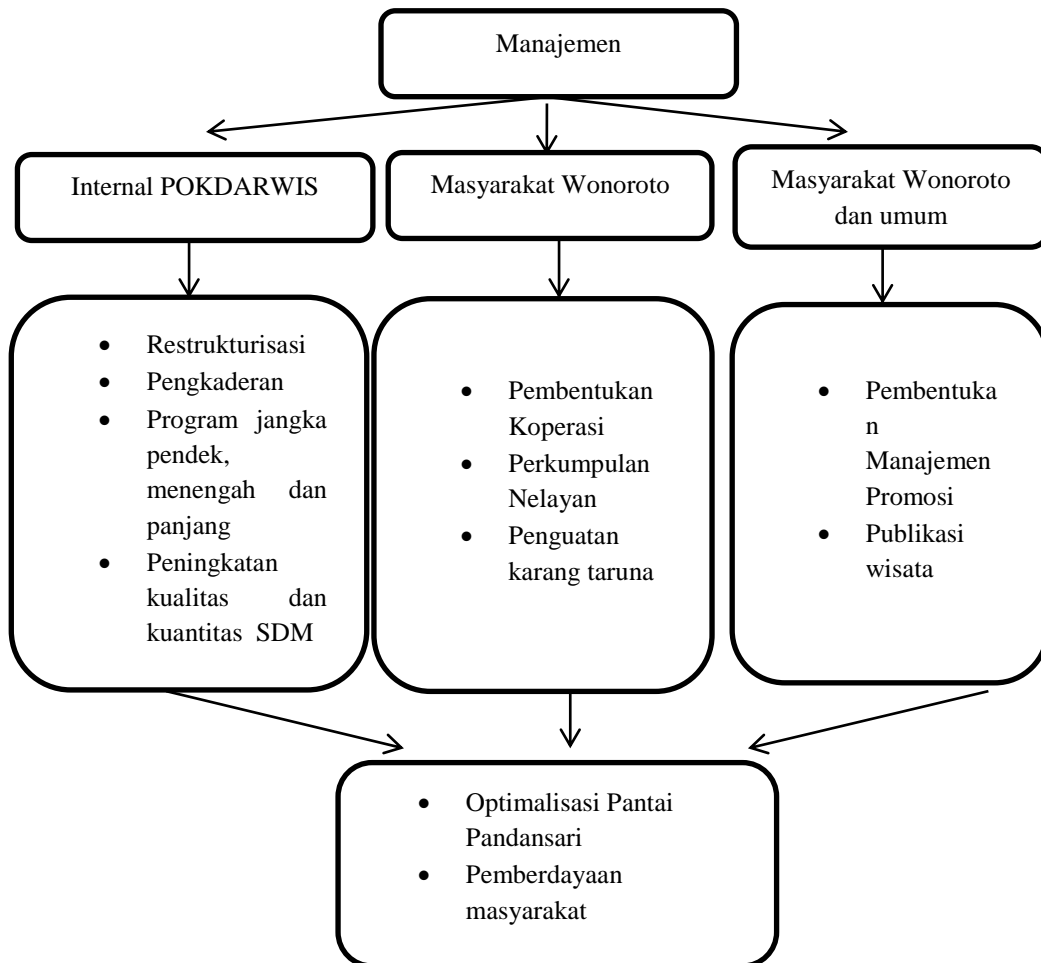
Pemerintah terdiri dari tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap bagian memiliki Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing (TUPOKSI) dengan tujuan yang sama mengatur kehidupan bermasyarakat guna kesejahteraan bersama. Dalam penelitian ini harapan masyarakat kepada pemerintah dari tiga bantuan tersebut mampu membantu pengembangan potensi ekowisata Pantai Pandansari.

Pemerintah mampu membantu potensi ekowisata Pantai Pandansari untuk dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal itu selaras dengan hasil wawancara terhadap dinas pariwisata untuk tetap ingin berkontribusi dan tidak membiarkan, hanya saja butuh waktu secara bertahap. Dengan tujuan utama untuk optimalisasi Pantai Pandansari dan juga pemberdayaan masyarakat

pesisir. Tentunya dibutuhkan kerjasama dan pengertian dari kedua belah pihak dari tingkat atas sampai bawah agar mampu berkesinambungan.

e. Kriteria Manajemen

Hasil dari penelitian AHP sebelumnya menempatkan manajemen pada peringkat keempat dalam optimalisasi Pantai Pandansari yang memiliki alternatif promosi, penguatan struktur pengelola dan pembentukan koperasi. Tentunya pola manajemen sangat berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu manajemen dalam hal ini terbagi dalam internal pengelola yaitu kelompok sadar wisata (POKDARWIS) karena masih minimnya partisipasi mengakibatkan tidak bergerak secara masih keberadaan POKDARWIS ini. kemudian untuk masyarakat Wonoroto pembentukan koperasi sangat dibutuhkan untuk menunjang struktur pemodalan dan juga kebutuhan lain yang menyangkut kegiatan ekonomi, dan tentunya manajemen untuk masyarakat luas dalam hal promosi karena masyarakat luas juga harus mengetahui keberadaan pantai yang menyimpan potensi luar biasa bukan hanya untuk wisata tapi juga beredukasi.



Gambar 4. 13
Skema Manajemen

Dari gambar diatas tadi adalah tiga pola yang diharapkan masyarakat dusun Wonoroto yang sudah dikonsultasikan dengan ahli. Ketiga komponen tadi mempunyai ranah kepengerusan yang berbeda aka tetapi dengan tujuan yang sama untuk mengoptimalisasi Pantai Pandansari dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Tentunya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus mampu terpenuhi secara maksimal.

